

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**

NOMOR 82

TAHUN 2023

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 67
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026****WALI KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang telah ditetapkan dan ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
24. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026.

Pasal I

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja setiap tahunnya.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Sistematika Penyusunan Perubahan Renstra PD terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
BAB VIII : Penutup.

- (2) Daftar Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok melakukan penelaahan dan memastikan konsistensi antara Perubahan Renstra PD dengan Renja PD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 November 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 82

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
DEPOK
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA DEPOK NOMOR 67 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2021-2026

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026

1. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Depok;
3. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok;
4. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
5. Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
6. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok;
7. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
8. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
9. Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;
10. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok;
11. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
12. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok;
13. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok;
14. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
15. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
16. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok;
17. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
18. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
19. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
20. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
21. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
22. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok
23. Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
24. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;
25. Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok;

26. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
27. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cinere Kota Depok;
28. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Beji Kota Depok;
29. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
30. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cilodong Kota Depok;
31. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sawangan Kota Depok;
32. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
33. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tapos Kota Depok;
34. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cipayung Kota Depok;
35. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
36. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota Depok;
37. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS